



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	✓	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	✓	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	✓ Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	--------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

Temuan BPK Di Sigi Rp 7,6 M



Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Bayu Sabartha (tengah) bersama tim pemeriksanya memberikan keterangan saat konferensi pers di gedung BPK, Senin (5/6/2017). FOTO: MAHBUB/MTG

Rp2,3 M Belum Dikembalikan
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kabupaten Sigi.

REPORTER : MAHBUB/MTG

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Bayu Sabartha pemberian predikat tersebut dikarenakan banyak temuan dari BPK mengenai permasalahan pengelolaan keuangan negara di Kabupaten yang dipimpin Irawan Lapatta dan Paulina Hartono itu.

Dalam konferensi pers, Bayu mengatakan sejumlah temuan BPK tersebut didominasi kesalahan pada paket pekerjaan fisik yang infrastruktur. "Nilai temuan sebanyak Rp 7,6 miliar lebih. Yang paling bermasalah adalah mengenai infrastruktur, seperti jalan dan jembatan," ungkap Bayu.

► Baca **TEMUAN BPK** Hal...

TEMUAN BPK dari Halaman

asal menyerahkan LHP kepada 4 Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Sigi, Buol, Morowali Utara dan Banggai Kepulauan.

Meski demikian, temuan BPK tersebut kekhawatiran negara senilai Rp 5,3 miliar lebih. Terlebih biaya Rp 2,3 miliar lebih. Untuk lebih spesifik mengenai temuan itu, Bayu menderikan kesempatan kepada ketua tim pemeriksa wilayah Sigi Sigit Purwasu untuk menjelaskan apa saja entitas temuan tersebut.

Dalam penjabarannya Sigit menguraikan item-item infrastruktur yang jadi temuan. Ia mengatakan ada tujuh item tersebut, seperti jalan dan jembatan.

"Di antaranya adalah jembatan Sunjo, Kalke dan jalan di wilayah Marawala Barat. Dari situ Rp 2 miliar yang belum dikembalikan, paling banyak soal jalan dan jembatan," beber Sigit.

Ia melanjutkan, nilai temuan BPK yang paling besar di Sigi adalah soal jalan dan jembatan, selain itu juga soal aset yang tercatat, tapi tidak mempunyai dokumen lengkap serta pengelolaan uang negara di beberapa lembaga SKPD. Pihak BPK memberikan waktu selama 60 hari kepada Pemkab Sigi untuk mengembalikan uang negara tersebut.

Bayu juga mengatakan bendaknya Sigi senantiasa memperbaiki kinerja tata kelola keuangannya dan tidak patah semangat untuk terus menerus membenahi infrastruktur pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyampaikan pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkap adanya penyimpangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan tindakan merugikan negara, maka hal ini harus diungkapkan dalam Laporan Hasil Keuangan (LHK).